



# Polda Usut Dugaan Korupsi UPS

**P**ENGADAAN *uninterruptible power supply* (UPS) yang disebar ke sejumlah sekolah diduga sarat korupsi. Pemprov DKI meminta Polda Metro Jaya untuk menuntaskan kasus itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Martinus Sitompul mengatakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah menyelidiki proyek pengadaan fasilitas penyimpanan cadangan listrik senilai Rp58 miliar itu.

Tahap penyelidikan meliputi pemeriksaan dokumen serta meminta keterangan beberapa pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

Martinus enggan menyebut siapa saja yang menjalani pemeriksaan demi kepentingan penyelidikan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Lulung sepakat dengan pimpinan dewan lainnya untuk melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Badan Reserse Kriminal Polri atas tuduhan pelanggaran moral dan etika serta penghinaan terhadap anggota dewan.

Lulung mengatakan ketajaman mulut gubernur yang akrab disapa Ahok itu tengah memakan tuannya sendiri. Ucapan-ucapan Ahok yang kerap menuding anggota dewan pencuri, perampok, bahkan begal anggaran tanpa bukti telah tersebar luas di masyarakat sehingga mencemarkan profesi anggota dewan.

"Kepala daerah harus jaga etika, norma, dan moral dalam roda pemerintahan. Harus bermitra dengan baik dengan legislatif. Penghinaan secara

Upaya percobaan suap senilai Rp12,7 triliun yang diduga dilakukan Sekretaris Daerah DKI terhadap Ketua DPRD DKI

Prasetyo Edi Marsudi di rumah dinas juga dilaporkan ke polisi.

sengaja terhadap kelembagaan DPRD DKI dan oknum-oknum anggota dengan kata-kata begal, maling, bahasa pencuri. Akan kita dilaporkan ke Bareskrim," kata Lulung.

Selain itu, Lulung akan melaporkan Ahok soal pemalsuan dokumen RAPBD DKI yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

## Percobaan suap

Pimpinan dewan juga akan menjerat pihak eksekutif dengan tuduhan percobaan suap senilai Rp12,7 triliun. Upaya suap tersebut, menurut Lulung, dilakukan oleh Sekretaris Daerah DKI Saefullah. Lulung menuturkan Saefullah mendatangi kediaman Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk menyodorkan proyek triliunan rupiah tersebut.

Namun, Saefullah menampik tuduhan tersebut. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta justru mempertahankan agar tetap menerapkan sistem *e-budgeting* dalam APBD 2015.

Dengan begitu, beberapa program yang tidak ada dalam pembahasan tidak bisa dimasukkan. "Jadi, apa yang disuap, justru kita mempertahankan *e-bugeting* setengah mati. Tidak ada pakai suap-suap," kata Saefullah.

Meski demikian, ia mengakui bersama dengan beberapa

kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pernah mendatangi rumah Ketua DPRD DKI. Kedatangan mereka tidak untuk menyuap, tapi sesuai undangan dari pihak legislatif. (Gol/Put/Ssr/J-1)